PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

UNIT KERJA : **WAKIL PIMPINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RICHI APRIAN**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **759875**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/500 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 200000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 180.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BG6 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 64.000.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	700.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.844.000.000
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.844.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.